

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI YANG MENJADI ACUAN PUTUSAN

Presented by: Dr. Sunny Ummul
Firdaus, S.H., M.H.



PRINSIP KONSTITUSI

Prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan putusan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Meski begitu, terdapat prinsip-prinsip umum yang bersifat universal yang sering menjadi acuan dalam proses pengadilan dan putusan konstitusi



SUPREMASI KONSTITUSI



Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Apabila ada ketidaksesuaian, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah

KETENTUAN YANG TEGAS DAN JELAS

Putusan konstitusi cenderung mengacu pada ketentuan konstitusi yang jelas dan tegas.

Apabila terjadi ketidakjelasan atau ambiguitas dalam konstitusi, maka tugas pengadilan adalah untuk menafsirkan dan memutuskan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku





SEPARATION OF POWERS

Kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing yang tidak boleh ada saling campur tangan secara berlebihan

PERLINDUNGAN HAM



Konstitusi sering kali mengandung deklarasi atau penjaminan hak-hak individu yang oleh karenanya Putusan Konstitusi dapat berlandaskan pada perlindungan hak-hak tersebut ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM

KEADILAN DAN KESETARAAN HUKUM

Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Apabila ada ketidaksesuaian, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah



KONSISTENSI DAN PRESEDEN

Putusan Konstitusi seringkali mencari konsistensi dengan putusan sebelumnya dan mencoba untuk mengikuti preseden hukum yang sudah ada agar terciptanya stabilitas dan kepastian hukum





KONTEKS SOSIAL DAN PERUBAHAN WAKTU

Konstitusi merupakan dokumen yang seringkali bersifat kaku dan sulit diubah tetapi putusan konstitusi juga harus mempertimbangkan perubahan sosial dan tuntutan zaman yang mungkin tidak diantisipasi oleh para penyusun konstitusi asli

RULE OF LAW

Negara harus berada di bawah kekuasaan hukum, bukan sebaliknya. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang



KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI



Proses pengadilan dan putusan konstitusi harus bersifat terbuka dan transparan, sehingga publik dapat memahami dasar hukum dari keputusan tersebut dan memutuskan akuntabilitas lembaga-lembaga negara

IMPORTANT NOTE

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip umum dan tidak mengikat seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Negara-negara dengan tradisi hukum atau sistem politik yang berbeda mungkin memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap putusan konstitusi



mengenal
SISTEM PEMERINTAHAN
Indonesia



@AyoVote



TERIMA KASIH